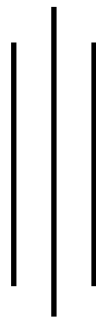




**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 2015-2019
DAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 2015**



**BADAN LEGISLASI DPR RI
TAHUN 2015**

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TAHUN 2015-2019

NO	JUDUL RUU	KETERANGAN
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	DPR/PEMERINTAH
4	RUU tentang Persandian	DPR/PEMERINTAH
5	RUU tentang Rahasia Negara	DPR/PEMERINTAH
6	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH
7	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/PEMERINTAH
8	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH
9	RUU tentang Konvergensi Telematika	DPR/PEMERINTAH/ DPD
10	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH

11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	PEMERINTAH
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR
13	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	PEMERINTAH
14	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
15	RUU tentang Perubahan atas UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos	PEMERINTAH
16	RUU tentang Perubahan atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	DPR/DPD
17	RUU tentang Perubahan atas UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR
19	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR
20	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	DPR/PEMERINTAH
21	RUU tentang Pertanahan	DPR
22	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD	DPR/PEMERINTAH/ DPD
23	RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH/ DPD

24	RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	DPR/DPD
25	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR/PEMERINTAH
26	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	DPD
27	RUU tentang Provinsi Bali	DPD
28	RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara/ RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	DPR
29	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD
30	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan	DPD
31	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR
32	RUU tentang Perkumpulan	DPR/PEMERINTAH/ DPD
33	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
34	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR

35	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/PEMERINTAH
36	RUU tentang Perubahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	PEMERINTAH/DPD
37	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR/PEMERINTAH
38	RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	PEMERINTAH/DPD
39	RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI	DPR/PEMERINTAH
40	RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
41	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH
42	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	DPR/DPD
43	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR/PEMERINTAH
44	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	PEMERINTAH
45	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR

46	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH
48	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	PEMERINTAH
49	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR
52	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR
53	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	PEMERINTAH
54	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PEMERINTAH
55	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH
56	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH

57	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH
58	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	PEMERINTAH
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	DPR
60	RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	DPR
61	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)	DPR
62	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	DPR
63	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR
64	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPR/PEMERINTAH/DPD
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/PEMERINTAH
66	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/DPD
67	RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	DPR/PEMERINTAH

68	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH
69	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	DPR
70	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia	PEMERINTAH
71	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR/DPD
72	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/PEMERINTAH
73	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR
74	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR
75	RUU tentang Kedaulatan Pangan	DPR
76	RUU tentang Jalan	DPR/DPD
77	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR
78	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR
79	RUU tentang Arsitek	DPR

80	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
81	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR
82	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR
83	RUU tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN	DPR
84	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	DPR/DPD
85	RUU tentang Perkoperasian	DPR/PEMERINTAH/DPD
86	RUU tentang Pertembakauan	DPR
87	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
88	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
89	RUU tentang Bahan Kimia	PEMERINTAH
90	RUU tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH
91	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPD
92	RUU tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	PEMERINTAH

93	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD
94	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR
95	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
96	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
97	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	DPR/PEMERINTAH
98	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR
99	RUU tentang Geologi	DPR/DPD
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR
101	RUU tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR
102	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	DPR/PEMERINTAHAN/DPD
103	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR
104	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR

105	Tentang Penyandang Disabilitas	DPR
106	RUU tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	DPR/DPD
107	RUU tentang Kepalangmerahan	DPR
108	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	DPR
109	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan	DPR
110	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR
111	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	DPR/PEMERINTAH
112	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	PEMERINTAH
113	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR
114	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
115	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR/DPD
116	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR

117	RUU tentang Kebidanan	DPR/DPD
118	RUU tentang Kejarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH
119	RUU tentang Perubahan Atas UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	DPR
120	RUU tentang Praktik Kefarmasian	DPR
121	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR
122	RUU tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH
123	RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH
124	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	DPR/PEMERINTAH
125	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR/PEMERINTAH
126	RUU tentang Perubahan atas UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/PEMERINTAH/DPD
127	RUU tentang Kebudayaan	DPR
128	Tentang Bahasa dan Kesenian Daerah	DPD
129	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR
130	RUU tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR/DPD

131	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR
132	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH/DPD
133	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR
134	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH
135	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DPR/PEMERINTAH
136	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	DPR/PEMERINTAH
137	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
138	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR/DPD
139	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR
140	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH
141	RUU tentang Pajak Penghasilan	PEMERINTAH/DPD
142	RUU tentang Perubahan atas UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMERINTAH/DPD

143	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH/DPD
144	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 tentang lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
145	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH
146	RUU tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH
147	RUU tentang Lelang	PEMERINTAH
148	RUU tentang Penjaminan	DPR
149	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH
150	RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	PEMERINTAH
151	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH
152	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPD
153	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR/DPD
154	RUU tentang Perubahan atas UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH
155	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH

156	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH
157	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH
158	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	PEMERINTAN
159	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR
160	RUU tentang Tabungan Haji	DPR

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Jakarta, 9 Februari 2015

BADAN LEGISLASI DPR RI

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
ANCANGAN UNDANG-UNDANG
PRIORITAS TAHUN 2015

NO	JUDUL RUU	DRAF NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
2	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	PEMERINTAH
4	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD
5	RUU tentang Pertanahan	DPR
6	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	DPR
8	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR
9	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR
10	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH

11	RUU tentang Merek	PEMERINTAH
12	RUU tentang Paten	PEMERINTAH
13	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH
14	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Negara	DPR
15	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	DPR
16	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR
17	RUU tentang Arsitek	DPR
18	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR
19	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	DPR
20	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR
21	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR
22	RUU tentang Pertembakauan	DPR
23	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR

24	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
26	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR
27	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggara Umrah	DPR
28	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR
29	RUU tentang Keekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH
30	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR
31	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR
32	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR
33	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR

34	RUU tentang Penjaminan	DPR
35	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
36	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH
37	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	PEMERINTAH

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Jakarta, 9 Februari 2015

BADAN LEGISLASI DPR RI